

INTEGRASI ILMU POLITIK DENGAN ILMU MAQASHID: PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI ISLAM

Nur Aisah Simamora*

Abstrak

Salah satu faktor terkuat yang membuat umat Islam terbelakang dan berada di *pheri-pheri* peradaban adalah dikotomi yang melanda pemikiran mereka tentang berbagai aspek; mulai dari dikotomi antar ilmu, antar pendekatan, dikotomi ilmu dengan Allah, manusia, dan alam raya, dikotomi ilmu dengan etika, bahkan dikotomi antara ilmu dengan aktualitasnya di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalamnya ilmu politik yang mengalami dikotomi di berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk menetralkan kembali keadaan ini, dunia pemikiran dan berikutnya dunia pendidikan Islam membutuhkan terapi yang serius yang diistilahkan dengan integrasi. Salah satu cabang ilmu yang paling dikotomis disikapi oleh umat Islam dengan hidup dan pemikiran beragama adalah ilmu politik dan dunia politik, sampai-sampai mayoritas masyarakat muslim merasa ilmu politik dan berpolitik bukan bagian dari ibadah dan ilmu Allah, bahkan sebagai jalur legal untuk tidak beretika. Tentu saja hal ini menjadi sebuah kekeliruan yang sangat fatal dalam pemikiran umat Islam, di mana seharusnya ilmu politiklah cabang ilmu yang paling potensial untuk menghantarkan seseorang menjadi *khairu ummah* yang memiliki *power*, mandat, wewenang untuk *al-amru bi al-ma'rûf* sekaligus *an-nahyu 'an al-munkar*. Untuk menyadarkan kekeliruan ini, sekaligus untuk menterapi keadaan ini, maka ide-ide integrasi keilmuan, khususnya ilmu politik dengan ilmu maqashid sangat dibutuhkan, sehingga umat bisa melihat dan memahami bagaimana hirarki seluruh ilmu ketika ilmu itu memancar dari Allah Sang *Nûr al-Anwâr*, dan dapat melihat jaringan kerjasama, tugas, dan fungsi setiap cabang ilmu dalam mewujudkan *maqâshid Syâri'* dalam penciptaan alam raya dan seisinya.

Abstract

One main factor which affects Islam as backward people in this pre-civilization nowadays is some dichotomies which surge their thoughts in all aspect, such as dichotomy between sciences and approaches, dichotomy between science and Allah, humans and this universe, dichotomy between sciences and ethics, and dichotomy between sciences and its actualization among communities. Therefore, to re-neutralize this condition, thought sphere and islamic education sphere need a serious therapy which is termed by integration. A massive dichotomy science knowledge which is faced by moslem people with life and religion condition is politic science and politics sphere up to most of moslem community find that politic science and engage of politics are not part of worship and God knowledge. Certainly, this must a very big blunder in moslem people thought, where the politics science must be a very potential branch of conducting someone to be *khairu ummah* who has a great power as *al-amr bi al-ma'ruf* (the callers of the kindness) and *an-nahyu 'an al-munkar* (the deterrents of the badness). To disenchant this blunder, and to apply the therapy of this condition, then the ideas of the knowledge integration especially politics is so crucial. Later the moslme people can see and understand how the hierarchy of all knowledge spread out from Allah, The Tranmitter of lambency (*Nûr al-Anwâr*), an can see the cooperative a network, duties the function of each knowledge branch.

Keywords: integrasi ilmu, *ilmu al-maqâshid*, dikotomi, ilmu politik, epistemologi Islam

*Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU Medan. Hp. 08126584562. Email: shimra@yahoo.com

A. Pendahuluan

Aspek ilmu pengetahuan merupakan salah satu faktor terbesar dan fundamental yang menyebabkan keterbelakangan suatu bangsa. Sudah dikenal dalam sejarah umat manusia bahwa ilmu pengetahuan mempunyai korelasi yang positif dengan maju-mundurnya sebuah bangsa. Bangsa yang ilmu pengetahuannya berkembang dengan baik adalah bangsa yang maju, bahkan terkemuka di dunia, sekalipun dari sudut jumlah penduduk wilayah geografisnya tidak begitu besar.¹

Hal di atas sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syahrin Harahap² bahwa ada tiga kekuatan yang paling berpengaruh dalam proses globalisasi dunia, yaitu: (1) Universitas yang memproduksi teori, gagasan, dan pemikiran-pemikiran baru yang dapat mendorong perkembangan masyarakat dan peradaban, (2) manufaktur yang memproduksi barang yang akan dimanfaatkan oleh umat manusia yang kemudian merubah wajah dan penampilannya hingga terjadi perubahan hebat dan besar-besaran, (3) perbankan yang mengelola uang dan dana yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai segala macam proyek dan kegiatan yang kemudian dapat mendorong perubahan masyarakat, di mana ketiga penggerak globalisasi di atas didasari oleh ilmu pengetahuan, dan dengan demikian, ilmu pengetahuan berjalan mendahului perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga dan mengawal posisi sebagai yang mendahului, maka ilmu pengetahuan harus terus dinamis dan berkembang.³

Di sisi lain, kemajuan ilmu juga berkorelasi dengan apresiasi masyarakat, khususnya para penguasa dan orang kaya terhadapnya. Semakin tinggi apresiasi masyarakat terhadap ilmu, maka akan semakin berkembang ilmu pengetahuan pada masyarakat tersebut. Oleh karena itu, ketika keadaan ilmu pengetahuan dan pendidikan terlihat begitu melorot dari sudut kualitasnya, maka itu menjadi pertanda

¹Mulyadhi Kartanegara, *Raktualisasi Tradisi Ilmiah Islam*. (Jakarta: Baitul Ihsan, 2006), h. 1.

²Seorang ilmuwan, cendikia, tokoh pemikiran dan filsafat Islam di Sumatera Utara yang banyak memberikan perhatian terhadap integrasi ilmu, Islam dan modernitas, Ilmuwan dan kesalehan ilmiah.

³Syahrin Harahap, *Integrasi Ilmu dan Kesalehan Ilmiah*, cet. Kedua. (Medan: Istiqamah Mulya Poundation, 2016), h. 3-4.

kuat atau rendahnya apresiasi masyarakat (termasuk di dalamnya penguasa) terhadap ilmu pengetahuan.⁴ Dalam hal ini, ilmu politik termasuk kategori ilmu yang tidak begitu mendapat apresiasi dari masyarakat muslim kecuali hanya sedikit, dan dipersepsikan masyarakat sebagai ilmu yang terlihat tidak begitu berkualitas untuk memajukan taraf kebahagiaan orang banyak, ia hanya dapat meningkatkan ekonomi segelintir tokoh eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan cara-cara culas, korup, zalim, dan curang, bahkan ilmu yang tidak “melibatkan” Tuhan dalam keputusan-keputusan politik. Untuk meluruskan persepsi ini sekaligus menterapi tradisi maupun pemikiran yang keliru ini, tulisan ini digagas, dijelaskan permasalahannya, serta ditawarkan solusi yang memungkinkan untuk diimplementasikan, agar politik keummatan bergerak dinamis sesuai dengan arahan dan panduan yang telah digariskan Allah dan Rasulnya.

B. Pembahasan

1. Integrasi atau Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris, *integration*, yang berarti mengkombinasikan beberapa cabang ilmu ke dalam satu kesatuan dengan tujuan untuk menyempurnakannya.⁵ Dalam istilah Arab, integrasi memiliki padanan kata, seperti: *at-tawhîd* (penyatuan), *ad-damaj* (menggabungkan, me-merger-kan, meleburkan, memadukan, mengkombinasikan, mencampurkan), *yukâmil* (melakukan proses penyempurnaan), *takâmulma'rifiy* (saling menyempurnakan).⁶ Meskipun demikian, kata integrasi telah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, karena

⁴Mulyadhi ..., *Raktualisasi...*, h. 6.

⁵A.S. Hornby with A. P. Cowie, A. C. Gimson, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. (London: Oxford University Press), h. 444. Dalam kamus *Advance*, kata integrasi berasal dari *integrate* yang berarti *combine (parts) into a whole; complete (sth that is imperfect or incomplete) by adding parts*. Adapun kata *integration* berarti kata benda dari *integrate* ataupun *being* (proses menjadi). Dalam teori ilmu, integrasi ilmu berarti mengkombinasikan bagian-bagian yang sangat banyak ke dalam satu kesatuan atau keseluruhan, dengan tujuan untuk menyempurnakan sesuatu yang sebelumnya belum sempurna, ataupun dengan menambahkan bagian-bagian tertentu ke dalam sesuatu untuk menyempurnakannya.⁵

⁶ Munir al-Ba'labakkiy, *Al-Mawrid; Qamus Inkliziy – Arabiy, A Modern English- Arabic Dictionary* (Berut: Dar al- 'Ilmi li al-Malayin, 2003), h. 472.

telah ditemukan dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti “pembrauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat”.⁷

Artikulasi kata integrasi dari berbagai bahasa didefinisikan oleh Mulyadhi Kartanegara sehingga menjadi “kesadaran bahwa semua disiplin ilmu pada hakikatnya adalah satu sumber dan satu tujuan, diawali dengan ilmu-ilmu yang bersifat teoritis-metafisis hingga ke ilmu-ilmu terapan atau praktis”.

Menurut Sayyed Husein Nasr, *al-'ilm* dalam tradisi Islam merujuk pada *presential knowledge (al'ilm al-hudhuri)*, yaitu: pengetahuan yang dapat memadukan ilmu dengan iman, akal dengan qalb, alam fisik dengan alam metafisik. Jenis pengetahuan ini disebut Hossein Nasr dengan sains sakral (*scientia sacra* atau *sacred sains*). *Scientia sacra* adalah pengetahuan suci yang terletak di pusat setiap wahyu dan menjadi pusat lingkaran yang mencakup dan menggambarkan tradisi.⁸ Hal yang mirip dengan ide integrasi Hossein Nasr adalah konsep yang ditawarkan oleh Osman Bakardengan beberapa pengembangan. Osman Bakar melihat bahwa sains modern meliputi lima obyek yang mungkin untuk diketahui manusia mulai dari tingkat terendah alam material, alam subtial, alam malakut, sifat-sifat ilahiyyah, sampai yang tertinggiesensi ilahiyyah. Osman Bakar juga melihat bahwa sumber utama pengetahuan dalam Islam adalah wahyu dengan ketiga jenisnya, yaitu: (1) wahyu obyektif (Alquran), (2) Wahyu subyektif (akal), (3) dan wahyu kosmik (alam raya atau *takwini*)⁹

Istilah islamisasi pengetahuan mengandung dua makna yang sangat dekat, Pertama: sebuah pengetahuan yang memiliki agama, Kedua: pengetahuan yang ada selama ini, baik itu sebahagiannya atau keseluruhannya tidak selaras dengan ajaran Islam, sehingga pengetahuan tersebut perlu dimodifikasi dan diwarnai nilai-nilainya

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 437.

⁸Sayyed Hossein Nasr, *Knowledge and the Sacred*. (New York: State University of New York Press, 1989), p. 119.

⁹Osman Bakar, *Tawhid and Science: Tauhid dan Sains: Esai-Esai tentang Sejarah dan Filsafat Islam*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 31.

dengan warna-warni ajaran Islam.¹⁰ Imaduddin Khalil juga menengahkan defenisi islamisasi ilmu pengetahuan yang senada dengan defenisi di atas.¹¹

Ismail Razi I-Faruqi¹² menawarkan istilah islamisasi sebagai respon terhadap berlangsungnya proses panjang deislamisasi¹³ pendidikan terhadap masyarakat dan generasi muslim di setiap jenjang pendidikan, terlebih-lebih di jenjang pendidikan tinggi yang direkayasa oleh para kolonialis di masa penjajahan.¹⁴

¹⁰Al-Mizan Study Club, *Esai-Esai ke Arah Filsafat Ilmu Islam*, buku berkala I, cet. 2. (Kairo: 2012), h. 15. Islamisasi ilmu-ilmu Yunani dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam: justifikasi, adaptasi, dan kritik. Justifikasi artinya upaya seorang filosof atau ilmuwan untuk membenarkan pengadopsian filsafat Yunani dengan pelbagai alasan, termasuk alasan bahwa filsafat Yunani mempunyai sumber dan tradisi kenabian yang sama dengan Islam. Adaptasi artinya sikap selektif dari para pemikir Muslim dalam memilih, mengadopsi, sekaligus mengadaptasikannya dengan bahan-bahan yang tersedia agar tidak terjadi benturan nilai dan ideologis dengan kepercayaan Islam saat itu. Proses berikutnya adalah kritik, artinya upaya-upaya seleksi yang dilakukan diiringi dengan pengkajian-pengkajian yang lebih intensif terhadap karya-karya para filosof besar Yunani, dalam rangka menyesuaikan ajaran-ajaran tersebut dengan pokok-pokok ajaran Islam. Sebagai contoh; Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd, setelah melakukan pengkajian-pengkajian yang mendalam dan seksama terhadap ajaran-ajaran para filosof Yunani, mereka sering menemukan kejanggalan-kejanggalan atau kerancuan dalam sistem filsafat mereka. Untuk itu, mereka merasa perlu memperbaiki atau mengkritiknya agar lebih cocok dan sesuai dengan pandangan mereka sebagai seorang filosof muslim, dan itulah salah satu factor yang membuat mereka dikenal sebagai filosof muslim. Bukan hanya karena mereka beragama Islam, tetapi juga karena mereka telah melakukan islamisasi pada materi dan sistem filsafat para filosof Yunani yang telah diadopsi ke dalam ajaran Islam.

¹¹Selaras dengan defenisi islamisasi pengetahuan di atas, berikut ini juga merupakan defenisi islamisasi pengetahuan, hanya berbeda dari sisi diksi yang digunakan serta makna yang lebih luas, yaitu: “Kegiatan mengungkapkan, mengumpulkan dan menyebarkan pengetahuan dari sudut pandang Islam terhadap Tuhan, alam, kehidupan, dan manusia.” (Imad ad-Din Khalil, *Madkhal ilâ Islâmiyyat al-Ma'rifah Ma'a Mukhaththithin Muqtarihin li Islâmiyyat 'Ilm at-Tarikh, Silsilat Islamiyyat al-Ma'rifah ke 9*. cet. 3. (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2000), h. 15.) Islamisasi dapat mengambil dua bentuk; teorisasi (*tanzhîriy*) dan aplikasi (*tathbîqiy*). Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa yang teori merupakan kebutuhan primary dan gerbang yang menghantarkan untuk dapat melanjutkan ke tahap aplikasi. Hal ini dikarenakan bahwa teorisasi merupakan fase untuk mengenalkan istilah, membatasi defenisi, serta menjelaskan langkah-langkah dan target yang ingin diraih (*Ibid.*, h. 11.)

¹² Seorang cendekiawan muslim, tokoh penggagas islamisasi berkebangsaan Arab yang menjelaskan bahwa salah satu factor yang memunculkan islamisasi adalah karena derasnya upaya-upaya deislamisasi di dunia pendidikan.

¹³Upaya untuk menghilangkan nilai-nilai Islam dari dunia pendidikan, Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Mahyuddin. (Bandung: Pustaka, 1982), h. 13.

¹⁴Menurut beliau, satu-satunya penangkal untuk melawan proses deislamisasi -yang masih berlanjut hingga sekarang- di tingkat universitas adalah dengan membuat kebijakan untuk mewajibkan setiap dosen dan mahasiswa mempelajari kebudayaan Islam selama empat tahun. Setiap mahasiswa wajib mengambil mata kuliah kebudayaan Islam, menanamkan wawasan atau visi Islam, apapun program studi dan fakultasnya. Kenyataan bahwa seseorang beridentitas sebagai muslim, sebagai warga Negara, sebagai bagian dari ummat atau masyarakat muslimlah yang mewajibkannya untuk tahu, kenal, dan menuntut dengan serius bekal pengetahuan tentang warisan leluhur muslim, sejarah

2. Ilmu Politik Dalam Perspektif Islam dan Ilmu Maqashid

Secara etimologis politik yang dalam bahasa Arabnya disebut *sâsa-yasûsu-siyâsah* yang berarti *al-qiyâm alâ asy-sya`i bi mâ yushlihuhu* (melakukan sesuatu untuk membenahinya atau membuatnya lebih baik). *Yasûsu ad-dawâb izâ qâma alaiha wa râdhahâ* (mempolitisi hewan berarti mengurus, memelihara, melatih, dan menjinakkannya, termasuk di dalamnya mengupayakan kesejahteraan, keamanan, dan ketenangannya) dan *al-wâlîy yasûsu ra`iyyatahu* (seorang wali (pemimpin) tugasnya adalah mengurus segala urusan rakyatnya agar sejahtera, tenang, damai, bebas dari ancaman apa pun, bahagia di dunia dan diakhirat).¹⁵ Intinya, berpolitik berarti mengurus orang banyak, agar semua orang menjadi lebih baik hidupnya, *worldview*-nya, religiositasnya, ekonomi, strata sosialnya, kesehatannya, pendidikannya, dan lain sebagainya, dan ilmu politik merupakan ilmu yang memberikan dan mengajarkan tatacara, teknik, maupun seni mengurus orang banyak untuk tujuan-tujuan mulia seperti yang disebutkan di atas.

Secara terminologis, ilmu politik didefinisikan oleh Rasulullah SAW. dengan hadis berikut ini dan sesuai maksudnya dengan makna etimologis di atas.

عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعتة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لاني بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم

Artinya: “Dari Abu Hazim, ia berkata: aku telah bergaul dengan Abu Hurairah selama lima tahun, dan aku pernah mendengarnya menyampaikan bahwa Nabi SAW. pernah bersabda: “Dahulu Bani Israel selalu dipolitisi (dipimpin) oleh para nabi, dan setiap kali seorang nabi meninggal dunia, Allah akan mengutus seorang nabi yang menggantikannya, dan tidak ada lagi nabi yang diutus setelahku (setelah nabi Muhammad SAW.). Lantas, para sahabat bertanya; wahai Rasulullah! Siapakah yang akan datang setelahmu? Rasul SAW. menjawab: “akan banyak

ummat Islam, pemahaman semangat ummat Islam, wawasan keislaman, budaya-budaya Islam, nilai-nilai Islam, serta visi dan misi dari setiap ajaran Islam.¹⁴*Ibid.*, h. 27

¹⁵Khadijah an-Nabrawi, *Mawsu'ah Ushul al-Fikr as-Siyasiy wa al-Ijtima'iy wa al-Iqtishadiy Min Nab'I as-Sunnah asy-Syarifah wa Huda al-Khulafa'I ar-Rasyidin*. Ali Jum'ah, (ed.) (Kairo: Dar as-Salam, 2004), h. 19.

khalifah yang datang setelahku, oleh karena itu, taatlah pada baiat yang pertama, kemudian baiat yang berikutnya, berikanlah hak mereka (para khalifah), karena Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mereka tentang apa dan bagaimana mereka mempolitisi rakyat yang mereka pimpin”.¹⁶

Jadi, defenisi ilmu politik secara etimologis dan terminologis sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa di sisi Allah dan Rasul-Nya, ilmu politik dan berpolitik itu *integrated* dengan tugas kenabian yang berarti asalnya adalah perintah Allah, yang tentu saja bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia dan seluruh makhluk di alam rayadi dunia maupun di akhirat kelak, sesuai dengan aturan-aturan hidup yang telah ditetapkan Allah, yang tentu saja secara totalitas bernilai ibadah di sisi-Nya.

Defenisi politik yang telah disebutkan di atas sangat luas cakupannya, dan untuk lebih mengkonkritkannya, hadis Nabi SAW. berikut ini akan menerjemahkannya, yaitu:

كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته فالإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته والرجل في أهله راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعيةٌ وهي مسؤولةٌ عن رعيته والخادم في مال سيده راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته

Artinya: “Setiap diri adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam, ketua, presiden adalah pemimpin, dan pasti dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya terhadap seluruh rakyat atau warganya. Seorang suami adalah pemimpin untuk istri dan seluruh anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya (dalam mengelola dan memelihara harta suami), dan pasti dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pembantu adalah pemimpin dalam mengurus harta majikannya, dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepengurusan harta majikannya. Dan setiap diri adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sikap dalam kepemimpinannya terhadap bawahannya.¹⁷

¹⁶Al-Jam’u Baina ash-Shahihain al-Bukhari wa Muslim, 3/134, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah dan Ahmad dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal

¹⁷Al-jam’u baina ash-Shahihain al-Bukhari wa Muslim, 2/110.

Hadis di atas menggambarkan bahwa salah satu fungsi ilmu politik adalah untuk mendidik keterampilan diri atau tehnik di bidang leadership, manajemen diri (sebagai apa pun kapasitas seseorang), keluarga, masyarakat, bahkan manajemen sebuah negara yang besar. Selain itu, ilmu politik juga meniscayakan adanya bekal pengetahuan tentang eskatologis (ilmu tentang akhirat) dan metafisika (termasuk di dalamnya teologi, anglelogi, dan hal-hal ghaib lainnya yang dalam agama diajarkan untuk wajib diimani dan diketahui sesuai dengan informasi dari Alquran maupun hadis). Tanpa eskatologi, seorang penekun ilmu politik ataupun politisi, tidak akan mempersiapkan pertanggungjawaban atas setiap kepemimpinan yang diembankan kepadanya, padahal hadis di atas jelas-jelas telah menegaskan hal itu. Hal ini nantinya akan berakibat fatal dalam sikap dan keputusan politisnya. Demikianlah makna ilmu politik dan berpolitik yang disimpulkan dari hadis-hadis Rasul SAW. dan untuk selanjutnya akan dilihat keterkaitannya dengan ilmu maqâshid.

Maqâshid asy-syâri'hiya hayâtun thayyibah âminah muthmainnah fî ad-dunyâ wa al-âkhirah. Ilmu maqashid adalah ilmu yang membahas tentang tujuan-tujuan atau target-target yang dirancang Tuhan di balik setiap aturan hidup (syariat) yang ditetapkan-Nya untuk manusia dan seluruh makhluk, yaitu kehidupan yang menjanjikan kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan di dunia dan di akhirat bagi seluruh makhluk, melalui aturan-aturan hidup yang ditetapkan-Nya, baik itu berupa perintah (*amr*), larangan (*nahy*), kewajiban, *mandûb*, *mustahab*, makruh, halal dan haram, terkait dengan akidah, hukum, mau pun etika di dunia maupun di akhirat. Dan seluruh politisi dari seluruh bangsa di dunia sepakat untuk mengatakan bahwa tujuan Tuhan (*maqâshid asy-syâri'*) dalam menetapkan aturan hidup (syariat) adalah untuk mewujudkan tujuan di atas.

Karena ilmu politik, '*Ulûm as-siyâsah*, berarti '*ulûm al-muhâwalât wa al-adwât wa al-wasâ'il fî tahqîq maqâshid asy-syâri' bi tathbîq asy-syarâ'i'*, ilmu yang memberikan bekal berupa pengetahuan dan keterampilan dalam mengupayakan, mengatur, mengkondisikan, menemukan alat dan cara-cara untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan *Syâri'*, Tuhan, dengan cara mengimplementasikan syariat yang telah ditetapkan-Nya, jadi kaitannyadengan ilmu maqashid adalah adanya kesatupaduan,

kerjasama, integrasi, interkoneksi atau sinergitas antara pengetahuan tentang apa-apa yang menjadi tujuan atau rancangan besar Allah dalam penciptaan-Nya dengan cara, alat, atau wasilah untuk mewujudkan tujuan-tujuan maupun rancangan tersebut.

ilmu maqashid membekali seseorang tentang tujuan Tuhan di balik setiap aturan yang ditetapkan-Nya, sedangkan ilmu politik membekali seseorang dengan keahlian atau cara-cara untuk dapat mewujudkan tujuan Tuhan tersebut yang tentu saja akan menjamin tercapainya kebahagiaan hidup orang banyak di dunia mau pun di akhirat. Jika demikian dapat disimpulkan bahwa segala ilmu yang mengajarkan kepada manusia seluruh aturan hidup yang telah digariskan Allah secara mendasar, untuk selanjutnya membuat manusia dapat memahami tujuan hidup disebut ilmu maqashid, dan cara-cara untuk mewujudkan tujuan hidup tersebut disebut ilmu siyasah (politik).

3. Posisi Ilmu Politik Dalam Hirarki Ilmu

Seorang pakar pendidikan Ali Ahmad Madkur membuat klasifikasi ilmu dengan membaginya kepada dua kategori dan menawarkan ide untuk mengintegrasikannya, yaitu: *al-'ulûm asy-syar'iyah* dan *al-'ulum al-kawniyyah aw al-'aqliyyah*, dan menegaskan bahwa semua kategori ilmu merupakan pancaran (*mazhar*) dari kalimat-kalimat *ilâhiyyah*.

Al-'Ulûm asy-Syar'iyah yang disebut juga dengan *'Ulûm Maqâshid wa al-Ghâyât*, atau *'Ulûm Naqliyyah*-menurut istilah Ibnu Khaldun-, artinya adalah ilmu-ilmu pokok, dasar, asas, maqashid, atau ilmu yang membahas tujuan-tujuan besar Tuhan dalam penciptaan dan rancangan yang dibuat-Nya, sehingga ini menjadi isyarat bahwa ilmu dasar ini harus menjadi buku induk, acuan, panduan, standar, dan ukuran dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu wasilah, ilmu alat atau ilmu yang mengajarkan tatacara mewujudkan nilai-nilai mendasar tersebut. Nilai-nilai mendasar artinya nilai-nilai (*qiyam*) yang harus ada dalam setiap upaya kebaikan yang dilakukan. Adapun *'Ulum 'Aqliyyah aw Kawniyyah* sama dengan *'Ulûm al-Wasâ'il wa al-Adwât*, atau ilmu tentang cara, teknik, seni, terapan, dan strategi untuk mewujudkan tujuan-tujuan besar tersebut.

Kemudian, dua kategori besar atau klasifikasi ilmu di atas disusun dalam sebuah hirarki ilmu dengan cakupan masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap jenis ilmu pengetahuan tersebut, yaitu:

Pertama, kategori ilmu akidah dan syariah (masuk dalam kategori *ulûm syar'iyah*), dan merupakan ilmu tertinggi dan termulia, sesuai dengan obyek pembahasannya. *'Ulûm Syar'iyah* ini terdiri dari *'Ulûm Ijbâriyyah* dan *Ulûm Ikhtiyâriyyah*. *'Ulûm Ijbâriyyah* adalah jenis-jenis ilmu pengetahuan yang sifatnya *dharûriy* atau primer bagi setiap orang, yaitu: ilmu-ilmu yang terkait dengan akidah dan *ushûl* (dasar-dasar beragama dan menjalankan agama), akhlak, moral, etika, dan peraturan yang sifatnya permanen, dan ilmu *maqashid* masuk di bagian ilmu *ushul*. Adapun *Ulûm Ikhtiyâriyyah* termasuk di dalamnya ilmu-ilmu yang terkait dengan proses pembentukan hukum (*tasyri'*), administrasi (*tanzdîm*) di berbagai bidang.¹⁸

Jika disesuaikan antara hirarki ilmu yang diajukan oleh Ibnu Khaldun, maka disiplin-disiplin ilmu yang dikategorikan *syar'iy naqliy dharuriy ijbariy* (*syar'i*, normatif berdasarkan informasi wahyu, prinsipil tak bisa tidak, dan niscaya atau memaksa) termasuklah di dalamnya ilmu Tafsir, ilmu Qira`at, ilmu Hadis, ilmu Ushul Fiqh (di dalamnya termasuk ilmu *maqashid*), ilmu Fiqh, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu *ta'bir* mimpi.¹⁹

Adapun cabang-cabang ilmu yang termasuk pada *'ulûm 'aqliyyah* adalah: ilmu logika, ilmu fisika, ilmu metafisika, ilmu ukur atau matematika, yang terdiri dari teknologi, ilmu tentang bentuk dan gerak, aritmatika, musikologi, yang dijabarkan oleh Ali Ahmad Madkur dengan kategori ilmu militer, ilmu sains dan logika, ilmu tentang *lifeskill*.

¹⁸Ali Ahmad Madkur, *Manhajiyat Tadris al-Mawad asy-Syar'iyah*. (Kairo: Dar al-Mashriy li ath-Thibaah, 1999), h. 6-7.

¹⁹Sebagai tambahan kategori ilmu dari Ibnu Khaldun agar ilmu-ilmu *naqliyyah* tersebut dapat difahami dengan baik, maka ilmu alat menjadi penting dan urgen, seperti: ilmu bahasa yang terdiri dari linguistik, gramatika, semantik, dan sastra atau literatur. (Abdurrahman ibnu Khaldun al-Magribiy, *Muqaddimah min Kitab al-'Ibar wa Diwani al-Mubtada'i wa al-Khabar li al-'Allamah Ibnu Khaldun*, cet. Ke 2. (Beirut: Mathba'ah Adabiyyah, 1886), h. 380.)

Kedua, kategori ilmu di bidang militer dan teknik berperang (termasuk dalam *ulum kawniyyah* atau *aqliyyah*); ini termasuk cabang ilmu yang *ijbâriyyah* atau *dharûriyyah* karena ia berkaitan erat dengan konsep nasionalisme dan membela Negara (*al-jihad*). Adapun seni dan bentuknya tergantung pada kebutuhan dan peralatan militer yang berkembang di zaman tersebut.

Dalam konteks pahala, apresiasi Tuhan, atau ganjaran kebaikan juga *integrated* dengan Tuhan, karena tidaklah berbeda pahala antara *thâlib* atau pelajar dan *mu'allim* atau pengajar ilmu militer dengan pelajar dan mengajar ilmu-ilmu Alquran, jika masing-masing dijadikan standar nilainya berdasarkan Alquran. Dalam kategori ini, cabang ilmu yang dikategorikan Ibnu Khaldun sebagai '*ulum 'aqliyah* adalah *al-'ulûm al-hikmiyyah al-falsafiyyah*, segala disiplin ilmu yang terkait dengan hikmah, filsafat, dan fisika. Ilmu-ilmu jenis ini dapat dipelajari manusia lewat akal dan pemikirannya secara natural, bahkan juga untuk mempelajari berbagai tema-tema problematikanya, pembuktiannya, dan cara-cara mengajarkannya.²⁰

Adapun dasar-dasar ilmu filsafat ada tujuh, yaitu: (1) ilmu logika, (2) aritmatika (dan tercakup di dalamnya ilmu berhitung (*'ilm al-hisâb*), ilmu faraid, ilmu berinteraksi dan bertransaksi (*mu'amalatekonomi, sosial, politik*), (3) ilmu teknik, (4) ilmu bentuk planet dan gerakannya (termasuk di dalamnya ilmu tentang klimatologi atau peredaran angin dan metereologi, astrologi), (5) ilmu musik, (6) ilmu fisika (termasuk di dalamnya ilmu kedokteran), dan (7) ilmu metafisika (termasuk di dalamnya teologi, psikologi).²¹

Ketiga, kategori ilmu-ilmu alam (sains) dan logika (termasuk dalam kategori *ulum kawniyyah* atau *aqliyyah*), seperti: matematika, kedokteran, ilmu falak atau astronomi, ilmu pengetahuan alam atau biologi, fisika, kimia, ilmu-ilmu humaniora (sosial, politik, ekonomi), dan hasil dari ilmu-ilmu kategori ini haruslah menuju pada

²⁰Abdurrahman ibnu Khaldun al-Magribiy, *Muqaddimah min Kitab al-'Ibar wa Diwani al-Mubtada'i wa al-Khabar li al-'Allamah Ibnu Khaldun*, cet. Ke 2. (Beirut: Mathba'ah Adabiyyah, 1886), h. 380.

²¹*Ibid.*, h.418.

satu kesimpulan dan pembuktian akan kekuasaan dan keesaan Allah melalui pengenalan diri dan alam semesta.

Keempat: kategori ilmu ketrampilan atau *lifeskill*, dan sebaik-baik keterampilan adalah keterampilan memproduksi atau menginovasikan senjata dan alat-alat militer, karena senjata merupakan modal utama membangun power sebuah negara atau berjihad membangun nasionalisme. Dan keterampilan untuk model berjihad merupakan keterampilan terbaik yang dapat dipilih oleh seseorang, karena didasarkan pada hadis Rasulullah SAW.²²

Menarik sekali bahwa Ali Madkur melihat bahwa cabang-cabang ilmu seperti *lifeskill* dan kejuruan sama seperti ilmu-ilmu alam dan ilmu logika lainnya dari sisi urgensi dan *ijbariyyah* (kebutuhan primer) maupun *ikhtiyariyyah* (kebutuhan skunder) masyarakat terhadapnya, dan semuanya ditentukan oleh apa yang hilang dari masyarakat. Jadi, ketika ilmu tentang keahlian atau kejuruan dan *lifeskill* melemah ataupun menghilang dari masyarakat, maka cabang ilmu tersebut menjadi *ijbâriyyah* dan *fardhu 'ain* bagi setiap orang. Dan suatu saat nanti, ketika kebutuhan terhadap cabang-cabang ilmu tersebut telah terpenuhi, maka kategorinya berubah menjadi *ikhtiyâriyyah* (pilihan).²³

Namun, yang menjadi problem di dunia pendidikan modern adalah aturan yang dipilihnya cenderung lebih memprioritaskan yang penting daripada yang sangat penting, sehingga mereka merubah mata pelajaran yang bersifat *ijbâriyyah* dan *fardhu 'ain* menjadi mata pelajaran yang *ikhtiyâriyyah* dan *fardhu kifayah*. Akibatnya, komposisi untuk cabang ilmu logika dan ilmu-ilmu alam begitu besar dan

²²Hadis Rasulullah SAW. bahwa “diriwayatkan dari Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Furik, dari Abdullah bin Ja'far, dari Yunus bin Habib, dari Abu Daud bin Ath-Thayalisi, dari Hisyam, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Islam, dari Abdullah bin Yazid al-Azraq, dari Uqbah bin 'Amir al-Juhni ra., beliau menyatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah *Shalla Allahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan tiga orang sekaligus ke dalam surga karena sebuah anak panah, mereka itu: pembuat panah dengan tujuan kebaikan, orang yang memanah, dan orang yang menyediakan bahan-bahan pembuatan panah. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqiy, *Kitab as-Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, juz 10, nomor hadis: 19516. Ed. Muhammad Abdul Qadir 'Atho (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), h. 13.

²³Madkur, *Manhajiyat...*, h. 8.

mendapatkan jam pelajaran yang sangat tinggi, dan sebaliknya ilmu-ilmu akidah dan dasar-dasar syariat menjadi terkucilkan dan hanya mendapatkan jam pelajaran yang sedikit. Bahkan, mata pelajaran untuk seni berperang, ilmu militer, latihan-latihan mental menggunakan senjata ditiadakan samasekali dari mata pelajaran sekolah. Menurut beliau, ini merupakan salah satu indikator betapa jauhnya umat Islam dari *manhaj* yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan lebih memilih *manhaj* yang disusupkan ke tengah-tengah umat Islam. Bahkan, -karena sudah terbiasanya dengan *manhaj* dan mata pelajaran yang disusupkan dari Barat-, generasi muslim memandang bahwa mata pelajaran yang dari Barat sebagai suatu kebutuhan mendasar, sedangkan mata pelajaran yang terkait dengan akidah dan syariah sudah usang dan tidak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah salah satu bukti bahwa umat Islam telah kehilangan visi dan target pendidikan yang sejati sesuai dengan yang digariskan Allah. Akibatnya, umat Islam dan para pendidik telah kehilangan makna hidup dan tujuannya yang sejati, yaitu: untuk mengabdikan kepada Allah dengan cara mempersiapkan generasi-generasi unggulan yang siap dan memiliki bekal untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya.

Dari ide klasifikasi ilmu pengetahuan dan integrasinya sebagaimana yang ditawarkan Ali Ahmad Madkur, dapat dilihat di mana posisi ilmu politik pada hirarki ilmu dalam epistemologi Islam, serta sinergitas dan integrasinya dengan ilmu maqashid. Tulisan ini ingin menegaskan kembali bahwa ilmu yang membahas tentang seluruh aturan hidup yang ditetapkan Allah (baca: ilmu syariat), tujuan yang ditargetkan Allah dalam menetapkan aturan-aturan hidup tersebut (syariat) disebut ilmu maqashid, dan ilmu yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan aturan tersebut agar mencapai tujuan dan target disebut ilmu politik. Karena ilmu politik berfungsi untuk membekali seseorang dengan ilmu untuk mengurus, memelihara, mengatur, dan mewujudkan syariat Tuhan yang bertujuan untuk mengaktualisasikan kehidupan makhluk yang *thayyibah* (damai, aman, tenang, tentram, bahagia) di dunia maupun di akhirat kelak, dengan demikian, ilmu politik sangat *integrated* dengan ilmu maqashid.

Ilmu politik atau ilmu siyasah adalah ilmu untuk mensiyasati segala problematika kehidupan umat agar dapat terselesaikan dengan baik, sesuai dengan aturan main yang ditetapkan Tuhan, dan bukan ilmu untuk melakukan tipu daya, ilmu untuk mencari jabatan untuk mendapatkan harta, sebagaimana yang berkembang di masyarakat, dan hasilnya nanti akan menghantarkan manusia kepada *hayâtan thayyibah âminah muthmainnah fî ad-dunyâ wa al-âkhirah*, sehingga ilmu ini selalu terkoneksi dengan teologi, yang akhirnya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Pemberi amanah. Artinya, segala kegiatan mengurus manusia dan alam raya merupakan kegiatan yang terkoneksi dengan mandat Allah dan harus menghasilkan ridha-Nya atau bernilai ibadah di sisi-Nya. Sampai di sini, dapat dilihat betapa ilmu politik sebagai bagian dari ilmu-ilmu humaniora tidak bisa dipisahkan dari agama.

Makna politik di atas telah menjadi petunjuk dari Rasul SAW. bahwa kegiatan mempolitisi berkembang cakupannya, mulai dari mengurus lingkup yang terkecil sebagai person (*self management*), *family management*, kemudian lingkup yang luas sebagai masyarakat (*social management*), hingga yang terluas sebagai sebuah *daulah*, negara (*state management*), di mana di setiap jenjangnya, manusia adalah sebagai inti dari ummat (*mihwar al-ummah*) atau rakyat yang akan dipolitisi (diurus, diperbaiki, disejahterakan, dan dibahagiakan), karena manusia berfungsi sebagai sentral dan penggerak kehidupan.²⁴

Itulah sebabnya dalam visi Islam (*tashawwur Islamiy*), mengenal hakikat manusia salahsatu poin yang niscaya untuk difahami dengan baik dan benar oleh setiap individu, apa pun spesialisasi yang digelutinya, agar tidak salah menyikapi dan tidak salah tujuan.

4. Persoalan ilmu yang dikotomis

²⁴Khadijah an-Nabrawi, *Mawsu'ah Ushul al-Fikr as-Siyasiy wa al-Ijtima'iy wa al-Iqtishadiy Min Nab'I as-Sunnah asy-Syarifah wa Huda al-Khulafa'I ar-Rasyidin*. Ali Jum'ah, (ed.) (Kairo: Dar as-Salam, 2004), h. 19.

Dikotomi dalam dunia ilmu terjadi setelah adanya upaya-upaya Barat melakukan deislamisasi²⁵ atau disintegrasi atau dikotomi antara agama dan dunia, ilmu umum dengan ilmu agama, ilmu dengan Tuhan, ilmu dengan etika, ilmu dengan kebutuhan masyarakat, sehingga efek dikotomi semakin besar dan sistemik bagi dunia ilmu, model kehidupan di atas bumi, bahkan terhadap para pecinta dan penekun ilmu.

Dalam Islam diajarkan bahwa tujuan berilmu adalah untuk membuat manusia semakin bertaqwa kepada Sang Pencipta, *al'ilm an-nâfi' mâ qâranathu al-khasyyah* dalam segala tindakan menggunakan potensi yang telah diberikan Tuhan, dan selanjutnya untuk menjadi sosok yang memberi manfaat bagi kehidupan luas, meningkatkan kualitas hidup ke taraf tertinggi, khalifah di bumi dengan status *insan kamil*.

Akibat yang paling fatal dari dikotomi-menurut Penulis- adalah samar atau putusny koneksi dan korelasi antara setiap cabang ilmu yang selama ini dikategorikan ilmu umum dengan Allah, Sang Pemilik ilmu, sehingga seorang penekun ilmu memiliki sikap yang dikotomis dengan kebaikan, dikotomis dengan Tuhan, dikotomis dengan hal-hal yang *usefull for humanity*, dikotomis dengan upaya-upaya *ishlâhât* dalam mengelola alam raya dan seluruh penghuni bumi untuk melakoni hidup dengan cara-cara yang logis, agar mereka sampai pada tujuan hidup, yaitu, bahagia “di sini” maupun “di sana” kelak. Bahkan realitas yang tampak dalam kehidupan, ilmu semakin membimbing penekunnya untuk melakukan “kejahatan” (*al-fasâd*) di muka bumi. Padahal seharusnya setiap ilmu disebut “*Nur ilâhiy*”, yang tentu saja pancarannya untuk menerangi jiwa, hati, hidup, etika dan perilaku si penekun ilmu. Seharusnya, orang berilmu otomatis semakin dekat dengan Tuhan, tetapi karena ilmu umum telah dibuat terputus koneksinya dengan Sang Pemilik ilmu, bahkan dengan sesama cabang ilmu juga tidak berintegrasi, hasilnya bermunculanlah para ilmuwan yang mendapat gelar “*yufsidûna fî al-ardh*”, terlebih-lebih lagi di dunia politik. Atau sebaliknya, para penekun ilmu agama, memiliki sikap hidup yang

²⁵Istilah yang digunakan oleh Ismail Razi al-Faruqi untuk menggambarkan betapa mendesaknya kebutuhan umat terhadap islamisasi ilmu pengetahuan.

“melangit”, ilmunya tidak sampai menghantarkannya untuk menjadi *khairu ummah* dalam bentuk *amr ma'rûf* dan *nahi munkar*, yang dalam ilmu politiknya menjadi bagian dari salah satu dari tiga lembaga negara, eksekutif/pemerintah, legislatif, dan yudikatif, yang mendapat mandat dan wewenang menegakkan kebenaran maupun menbasmi segala hal yang meresahkan masyarakat, merusak agama mereka, bahkan mengancam hidup mereka.

Ilmu politik sebagai ilmu wasilah untuk merealisasikan rencana-rencana besar Tuhan dalam menciptakan manusia dan alam raya, jika ia ditekuni secara dikotomis, tidak akan menghantarkan si penekunnya kepada *maqâshid* atau tujuan dari ilmu politik itu sendiri, yaitu menjadi *khairu ummah*, *khairu an-nâs anfa'uhum li an-nâs*, di mana *khairiyyah al-ummah mawhûnun bi âdâihâ li wazhîfatihâ* (umat Islam menjadi *the best* di antara semua bangsa-bangsa di dunia sangat tergantung pada terlaksananya fungsi dan tugas umat Islam), yaitu menjadi umat yang memiliki power yang diakui untuk menegakkan dan mengkondisikan segala kebaikan di tengah-tengah masyarakat dan mencegah atau memberantas segala kejahatan yang mengancam hak-hak masyarakat luas (*al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*).²⁶

Ilmu politik telah terlanjur difahami masyarakat luas sebagai ilmu tipu daya, tipu muslihat, kelicikan, dan akal (daya upaya),²⁷ di mana defenisi ini muncul di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berdasarkan perilaku dan praktek politik sebagian politisi atau oknum politisi. Karena praktek oknum politisi yang berpolitik dengan tipu muslihat lebih tampak dan dominan di tengah kancah perpolitikan masyarakat Indonesia, menjadikan masyarakat menyimpulkannya secara holistik sebagai ajang legal-formal melakukan tipu muslihat. Akibatnya, bagi yang memiliki potensi dan bakat di bidang politik tipu muslihat, ia pun akan menekuni ilmu politik untuk tujuan-tujuan culas. Sebaliknya, orang yang tidak dilahirkan membawa fitrah

²⁶Ali Ahmad Madkur, *Manhajiyyat Tadris al-Mawad asy-Syar'iyah*. (Kairo: Dar al-Mashriy li ath-Thibaah, 1999), h. 6.

²⁷ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 763.

tipu muslihat, akan memasang sikap antipati dan apriori terhadap ilmu politik dan dunia politik, dan inilah yang telah melanda umat Islam, sehingga umat Islam menjadi satu umat yang besar secara kuantitas, tetapi sangat lemah secara kekuatan politik, korban dari sistem pendidikan yang dikotomis yang dibangun oleh kolonialisme Belanda dahulu.

Untuk menetralkan pemahaman yang keliru di ataslah salah satu tujuan dari tema ini dikaji dengan pendekatan epistemologis, sehingga umat Islam kembali ke ajaran Islam yang sesungguhnya, yang tidak menjauhi secara membabi buta ilmu politik dan dunia politik, tetapi justru untuk mewujudkan pesan Alquran agar umat menjadi *Khaira Ummatin ukhrijat li an-nâs, Ummatan wasathan*, ummat yang moderat. Pesan Allah agar umat nabi Muhammad Saw. menjadi *Khairu ummah* tidak akan terwujud, selama umat Islam memahami secara dikotomis antara ilmu politik dengan ilmu teologi, filsafat etika, filsafat hidup, Ushul Fiqh, Alquran, Hadis, dan berbagai macam cabang ilmu lainnya.

Pemisahan atau dikotomi antara ilmu politik dengan ilmu maqashid, bahkan dikotomi antar semua cabang ilmu, membuat semarak spesialisasi yang tak kokoh, yang mengakibatkan manusia spesialis tidak mampu menghadapi problematikanya sendiri yang ternyata bersifat kompleks dan multidimensi, dan akhirnya manusia modern gagal dalam mengarungi kehidupan (baca: tidak bahagia, masyarakat yang “sakit”).

Untuk menggambarkan betapa dahsyatnya upaya pemisahan ilmu dengan agama atau deislamisasi yang dialami oleh umat Islam, Prof. syahrin Harahap tidak hanya mengistilahkannya dengan dikotomi ilmu, tetapi juga dengan “percekcokan ilmu dengan agama” yang diakibatkan oleh sekulerisme militan. Persoalan dikotomi juga terjadi sebagai akibat dari cara berpikir yang tertutup, enggan memahami agama dan menafsirkan wahyu sebagai sesuatu yang menyejarah (corpus tekstual), sehingga

studi agama berjalan sendiri di lorong sempit dan tidak dikomunikasikan dengan perkembangan ilmu dan peradaban yang luas.²⁸

Dari analisis di atas, beliau menemukan bahwa ada lima dikotomi yang dihadapi umat Islam dan harus dire-integrasikan kembali, yaitu:

Pertama, dikotomi vertikal, saat ilmu pengetahuan terpisah dari Tuhan. Secara antroposentrik para ilmuwan merasa mencapai berbagai penemuan tanpa terkait dengan Tuhan, dan ini benar-benar sikap yang sangat keliru dari para ilmuwan. Dikotomi di aspek inilah yang paling banyak melanda dunia saat ini, sehingga perang antar manusia tidak pernah hilang. Hal ini dikarenakan para penemu teknologi meyakini bahwa penemuan mereka tidak ada hubungannya dengan ilmu Tuhan, baik untuk penemuannya mau pun dalam penggunaannya.

Kedua, dikotomi horizontal, hal ini dapat terjadi dalam dua bentuk. Pada satu sisi para pengkaji agama dalam bidang tertentu berjalan sendiri di lorong ortodoksinya sendiri, hanya memperhatikan satu dimensi dengan mengabaikan perkembangan bidang ilmu agama lainnya. Misalnya, ilmu fiqh hanya diajarkan berdasarkan dimensi hukum dan tidak dikombine atau diintegrasikan dengan dimensi kesehatan, moral-sosial, psikologi, ekonomi dan politik, sehingga masyarakat merasa ilmu fiqh dipelajari hanya untuk ilmu fiqh, dan tidak punya akses apa pun dalam berbagai dimensi kehidupannya sehari-hari.

Pada sisi lain, dikotomi dapat pula terjadi dalam bentuk atomistik, di mana pendekatan dalam bidang tertentu tidak dikomunikasikan dengan pendekatan disiplin ilmu lainnya.

Ketiga, dikotomi aktualitas, saat terjadi jarak yang sangat jauh antara pendalaman ilmu dan aktualisasinya dalam membantu dan mengembangkan kehidupan dan peradaban umat manusia. Dalam hal ini, ontologi dan epistemologi ilmu dijadikan sebagai tugas pokok keilmuan, sementara implementasi atau

²⁸Syahrin Harahap, *Integrasi Ilmu dan Kesalehan Ilmiah*. (Medan: Istiqamah Mulya Foundation, 2016), h. 13.

aksiologinya dipandang sebagai wilayah tak terpikirkan. Jadi ilmu cenderung hanya untuk ilmu, *science for science*.

Keempat, dikotomi etis, terjadinya jarak antara penguasaan dan kedalaman ilmu dengan etika dan kesalehan perilaku, baik itu saleh individual, komunal atau sosial, dan managerial. Ilmu tidak sejajar dengan akhlak para penekunnya, semakin tinggi ilmu politik atau sepak terjang politik seseorang, semakin membuatnya lihai dalam memainkan politik curang, politik manipulatif, dan politik abu-abu, sebagaimana fenomena yang kerap disaksikan masyarakat Indonesia di tanah air.

Kelima, dikotomi intrapersonal, di saat para penekun ilmu tidak menyadari kaitan antara ruhnya dengan jasadnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.²⁹

Persoalan yang timbul berikutnya adalah para penekun ilmu politik dan para politisi tidak memahami kaitan antara ilmu politik atau kegiatan berpolitik dengan *maqâshid asy-Syâri'*, sehingga menyebabkan kekeliruan-kekeliruan dalam pemikiran politik yang dibangun dan dikembangkan, sikap politik yang diimplementasikan, dan keputusan-keputusan politik yang ditetapkan. Menurut Penulis, tulisan ini sangat layak dan wajib dibaca oleh para politisi teoritis dan praktis, agar mereka tidak terjebak pada kekeliruan-kekeliruan dan disintegrasi dalam bersikap, berperilaku, dan membuat keputusan-keputusan politis.

Problem yang tak kalah menarik juga adalah sikap dan keputusan politik seorang politisi yang beragama Islam, tetapi tidak memiliki banyak akses kepada sumber-sumber dasar ajaran Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Rasul. Dengan kata lain, mengaku politisi muslim ataupun partai Islam, hanya dengan modal beragama Islam, tetapi tidak memiliki ilmu politik yang didasarkan pada Alquran, Hadis, dan *aqwâl* ulama. Bahkan yang lebih naif lagi jika sampai berpikir bahwa politik Islam artinya berpolitik dengan hanya menggunakan simbol-simbol Islam semata. Berpolitik islami harus bersifat formalis dan substantif sekaligus, untuk dapat menghantarkan seorang politisi muslim ke derajat yang telah dijamin oleh Rasul SAW. sebagai orang yang mendapat jaminan perlindungan di akhirat kelak (*yauma lâ*

²⁹*Ibid.*, h. 13-14.

zhilla illâ zhilluhu), yaitu: sosok *imâmun 'âdilun*, imam, pemimpin, ketua, anggota legislatif yang adil; yang senantiasa memikirkan kesejahteraan dan kebahagiaan buat rakyatnya. Jika hal inilah yang melanda mayoritas para politisi muslim, dapat dipastikan betapa sangat dikotomis antara sikap dan keputusan politik seorang muslim yang tidak memiliki akses terhadap sumber ajaran Islam dengan visi Islam dan tujuan-tujuan universal syariat Islam (*maqâshid asy-Syâri'*). Analisis penulis, kekeliruan pemikiran seorang politisi muslim di atas adalah akibat fatal dari tidak integrasinya keilmuan yang dibangun di dunia pendidikan, sehingga seorang penekun ilmu tidak pernah tahu akan kaitan keilmuannya dengan segala aspek keilmuan, kehidupan, dan segala entitas di alam raya, bahkan dengan Tuhan, Sang Sumber dan Pemilik ilmu.

Maqâshid asy-Syâri' tidak akan dapat diwujudkan oleh seorang politisi muslim hanya dengan beragama Islam, tanpa berupaya keras menimba dan menggali pesan-pesan politik islami yang diisyaratkan dalam Kitab Suci Alquran, hadis Nabi SAW, dan ditambah dengan sumber-sumber lainnya terhadap pembentukan peradaban manusia yang modern. Seharusnya, seorang politisi muslim harus senantiasa menggali prinsip-prinsip perpolitikan yang telah diatur Allah dan Rasul-Nya dalam Alquran dan Sunnah untuk dikaji, diteliti, dan direlevansikan dengan kondisi perpolitikan kekinian, lokal, regional, maupun internasional.

Sebagai contoh, seorang politisi praktisi muslim diberi mandat sebagai anggota legislatif, di mana ia harus berkontribusi dengan seluruh waktu dan pemikirannya untuk menyusun peraturan demi peraturan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Sesuai dengan aturan perpolitikan yang berlaku di Indonesia saat ini, tentu saja politisi tersebut sebagai bagian dari orang partai tertentu. Politisi ini membutuhkan penegakan obyektivitas dalam memberikan keputusan-keputusan politik, agar masalah yang ditimbulkan oleh keputusan politiknya tidak hanya berdampak bagi dirinya, keluarganya dan anggota partainya, tetapi juga berdampak positif dan sistemik bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, muslim mau pun non-muslim. Sebaliknya, ia juga harus sadar bahwa ketika

keputusan dan sikap politiknya hanya menimbulkan masalah secara parsial buat dirinya dan orang partainya, saat itu juga dampak negatif dari sikap dan keputusannya akan terasa sistemik bagi seluruh rakyat. Maka ketika seorang politisi tidak memahami *maqâshid asy-Syâri'* (masalah besar yang dirancang Tuhan untuk manusia) yang hanya bisa diwujudkan melalui lembaga legislasi, lantas menyia-nyaiakan kesempatan tersebut dengan membuat sikap dan keputusan yang tidak mewakili lembaga legislatif seluruh masyarakat Indonesia dan tidak maqashidiy, maka fungsi politik untuk mewujudkan *khair an-nâs li an-nâs* melalui *amr ma'ruf* dan *nahi munkar* tidak akan terwujud. intinya, seorang politisi muslim, dengan menjadi anggota legislatif berarti telah memiliki alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan besar yang dirancang Tuhan, tetapi karena ilmu politiknya dikotomis, tidak berintegrasi dengan ilmu maqashid, maka peran dan fungsi ilmu politiknya tidak menghasilkan sesuatu yang berarti bagi manusia, bahkan masalah diri dan keluarganya pun ikut terancam, sesuai dengan keterancaman seluruh rakyat Indonesia yang telah diabaikannya masalah dan maqashidi mereka.

Dalam konteks visi Islam atau *world view* Islam, puncak keilmuan manusia telah tercapai apabila seseorang mampu mewujudkan pengabdian kepada Allah dengan memainkan perannya sebagai makhluk yang diberi mandat untuk mengelola bumi sesuai dengan *manhaj* Allah, khalifah di bumi. Dalam hal ini, peran ilmu politik dan politisi sangat berpeluang besar untuk mewujudkan visi Islam di atas jika benar-benar memahami kaitan atau integrasi antara ilmu politik dengan ilmu maqashid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dituntut dari lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu politik dan sosial adalah untuk menghantarkan seseorang kepada derajat kesadaran yang tinggi akan fungsi dan perannya sebagai manusia yang hanya bisa sempurna jika peran itu telah dilakoninya dengan baik, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Jika telah sampai ke puncak kesadaran sebagai buah dari proses pendidikan tentang ilmu politik, secara otomatis, ia akan memberikan sumbangsih positif serta peran aktif dalam rangka

memakmurkan bumi, meningkatkan taraf hidup seluruh makhluk yang menghuninya di seluruh persada bumi sesuai dengan *manhaj ilahi*.³⁰

Jika dikongklusikan, visi Islam atau *at-tashawwur al-islamiy* bertujuan untuk membentuk *islamic worldview* (cara pandang yang dibangun Islam untuk memandang dunia dan seisinya, sebagaimana dijelaskan bahwa visi Islam (*at-tashawwur al-islamiy*) artinya *at-tafsîr al-islâmîy asy-syâmil li al-wujûd allazî yata'âmalu al-insânu 'alâ asâsihi ma'a hâzdâ al-wujûd, wa huwa yatamatstsalu fî al-maqûmât al-jauhariyyah al-arba'ah; ma'rifat haqîqat al-ulûhiyyah wa haqîqat al-insân wa haqîqat al-kawn wa haqîqat al-hayât* (Visi Islam adalah sebuah interpretasi yang islami dan holistik, komprehensif terhadap segala yang ada (wujud), dan atas dasar visi inilah seorang manusia berinteraksi dengan sesamanya, alam raya, kehidupan, dan Sang Pencipta kehidupan. Visi Islam mengkristal pada empat hal yang wajib diketahui dan difahami dengan benar, yaitu: mengetahui hakikat ketuhanan, mengetahui hakikat manusia, mengetahui hakikat alam raya, dan mengetahui hakikat hidup.³¹

Visi Islam yang dijelaskan di atas selaras dengan visi Islam yang dijelaskan oleh Ismail Raji al-Faruqi.³² Jadi, Islam yang sesungguhnya akan tampak dan tampil sebagai *rahmatan li al-'âlamîn* dan muslimnya sebagai *khairu ummah* hanya dengan cara memahami secara baik dan benar empat poin di atas yang salah satu aspeknya terkait dengan dunia pendidikan islamiy, kebudayaan Islam di mana leluhur-leluhur muslim dahulu merupakan sosok yang penuh semangat, selalu menggerakkan dan menghidupkan kehidupan, sosok yang memiliki prestasi yang gemilang di bidang kesenian dan sains, pribadi-pribadi yang unggul di bidang ekonomi, bisnis, dan politik,

³⁰ Ali Ahmad Madkur, *Manhajiyat Tadris al-Mawad asy-Syar'iyah*. (Kairo: Dar al-Fikr al'Arabiyy, 1999), h. 5.

³¹*Ibid.*, h. 23.

³²Salah satu ulama pencetus ide islamisasi ilmu pengetahuan (*islâmiyyat al-ma'rifah*) berkebangsaan Arab Saudi dan mewujudkan ide-idenya di International Islamic University of Malaysia (IIUM) atau Universitas Antar Bangsa (UIA) Malaysia.

dan pembesar-pembesar yang memahami organisasi sosial dengan penuh penghayatan terhadap nilai-nilai etika dan estetika.³³

Analisis Peneliti menyimpulkan bahwa *mindset* atau *world view* yang dibangun Islam terhadap empat poin di atas akan menjadi ukuran telah terwujudnya pemikiran yang *integrated* dalam diri seseorang. Dalam konteks epistemologis, filsafat ilmu menegaskan bahwa empat hal inilah yang menjadi dasar dan pijakan pengembangan keilmuan lainnya.

Atas dasar visi Islam di atas, pendidikan seorang muslim –apa pun cabang ilmunya-, terlebih-lebih lagi ilmu politik harus mampu memahamkannya tentang hakikat Tuhan, hakikat manusia, hakikat alam raya, dan hakikat manusia sesuai dengan konsep yang ditetapkan dalam visi Islam, serta segala hubungan dan keterkaitan antar keempat hakikat yang harus difahaminya sebagaimana dijelaskan di atas. Selanjutnya, ia akan memahami peran aktif yang dituntut darinya sebagai seorang manusia muslim. Pemahaman yang benar tentang visi Islam akan menghantarkannya menjadi sosok yang berfikir, merasa, dan berbuat berdasarkan aturan, jaminan, dan ketentuan Allah.

Setelah itu, dalam tahap lanjutan, visi Islam akan membuatnya faham tugas utamanya, yaitu: membangun dan melahirkan umat yang berfungsi untuk memerankan peran “eksekutor, perintis, pengkondisi kebaikan” bagi umat dengan cara menjadi pihak yang mendapat mandat dan wewenang yang legal dari umat, juga menjadi “penghalang, pelindung, dan penjaga umat dari kejahatan dan perbuatan munkar”, yang mampu mengkondisikan dan mensiyasati umat agar senantiasa beriman kepada Allah dan menjadikan hukum dan aturan Tuhan sebagai aturan hidup mereka dalam segala kondisi dan problem, kejahatan, maupun dosa besar dan kecil.³⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut ini:

³³Al-Faruqiy, *Islamisasi...*, h. 28-29.

³⁴*Ibid.*

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Ali 'Imran: 110)

Berdasarkan ayat di atas yang menjelaskan fungsi dan peran seorang muslim, ilmu politik yang *integrated* dengan Allah dan ke berbagai cabang ilmu lainnya seperti hirarki ilmu yang dijelaskan di atas, sangatlah potensial menghantarkan seorang muslim menjadi penggerak, *muharrrik*, pemilik wewenang, eksekutor, *khalifah fi al-ardh*, ataupun bagian dari pemerintahan maupun sosok yang bergerak membentuk legislasi, di mana itu semua bagian dari peran dan tugas para politisi.

5. Implementasi Integrasi Ilmu Politik dan Ilmu Maqashid

Upaya integrasi antara ilmu politik dengan ilmu maqashid dapat diterapkan di berbagai level³⁵, khususnya di level materi, jika mengikut kepada konsep integrasi-interkoneksi M. Amin Abdullah.³⁶Dari segi model, pendekatan integrasi dapat diwujudkan dengan beberapa model:

- a. Model informatif³⁷; artinya suatu disiplin ilmu harus diperkaya dengan berbagai informasi dari disiplin ilmu lainnya, sehingga wawasan civitas akademika seputar satu masalah semakin bertambah dan meluas. Contoh,

³⁵Ada beberapa level penerapan integrasi ilmu, yaitu: level materi dan level strategi. Level materi berarti integrasi pada kurikulum, penataan matakuliah dan hubungan antar disiplin ilmu, dan isi materi yang diajarkan. Adapun levelstrategi terletak pada kualitas keilmuan dan keterampilan para dosen saat mengajar, dan inilah yang menjadi kunci keberhasilan paradigma interkoneksi ini. Di samping itu, dosen juga harus difasilitasi dengan berbagai macam sarana pengayaan sumber.

³⁶Pada level materi, integrasi-interkoneksi dilakukan dengan tiga model pengejawantahan interkoneksi keilmuan antar disiplin ilmu, yaitu: (1) integrasi dalam paket kurikulum, (2) penataan mata kuliah dengan menegaskan hubungan antara dua disiplin ilmu agama dan umum, (3) integrasi dalam mengajarkan mata kuliah. Misalnya, integrasi antara mata kuliah psikologi dengan nilai-nilai Islam dengan menggunakan pendekatan fenomenologis.

³⁷Waryani Fajar Riyanto, *Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Dalam Penelitian Tiga Disertasi Dosen UIN Sunan Kalijaga*. (Yogyakarta: LEMLIT UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 62.

belajar tentang strategi pemenangan partai politik harus diperkaya dan diintegrasikan dengan sejarah perjuangan dan kemenangan Umat Islam di masa lalu atau *sirah nabawiyah*, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Dalam sabdanya “*nahnu min mâ`in*”.³⁸ Fakta sejarah ini akan memberikan contoh berkilah yang baik bagi politisi muslim, sehingga ia tetap dapat tampil diplomatis tanpa harus berbohong dalam ucapan maupun perbuatan. Artinya, tidak ada alasan legal bagi siapa pun, terlebih-lebih lagi seorang politisi untuk berkata dusta, berjanji palsu, berkomunikasi diplomatis-fiktif. Semua ada jalur legal-formalnya, jika ilmu politik yang ditanamkan lembaga pendidikan dalam dirinya integrated secara vertikal, horizontal, etis, aktualitas, dan intrapersonal.

- b. Model konfirmatif³⁹; yaitu suatu teori disiplin ilmu tertentu harus dilaga dan dikritisi melalui teori dalam disiplin ilmu lainnya, sehingga teori tersebut menjadi lebih kokoh dan teruji. Contoh: teori bahwa keputusan politik tidak sama dengan keputusan ilmiah, di mana keputusan politik sering sekali

³⁸Menjelang perang Badar dan sebagai bagian dari strategi berperang Nabi SAW, untuk mengetahui besarnya kekuatan musuh, strategi yang dipakai oleh Rasulullah adalah dengan mencari informasi dari masyarakat Arab Baduwi yang ditemui diperkampungan. Ketika itu Rasul SAW. bersama dengan Abu Bakar r.a. –diriwayat yang lain dikatakan bersama Qatadah bin an-Nu'man, dan ada juga yang meriwayatkan bersama dengan Mu'adz bin Jabal-, sehingga Rasul SAW. sudah berada di kawasan yang dekat dari lokasi perang Badar sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang Baduwi yang sudah tua yang bernama Sufyan –dan dikenal bukan seorang muslim atau belum mengenal Islam-. Lantas, Nabi SAW bertanya kepada orangtua tersebut tentang orang Quraisy, tentang Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dan berita apa saja tentang mereka yang telah sampai kepadanya. Lalu, orangtua itu menjawab, “Saya tidak akan memberikan keterangan apa pun sampai kalian berdua menjelaskan siapa kalian sesungguhnya!”. Lalu hal itu dijawab oleh Rasul SAW, “Jika Anda ceritakan kepada kami, kami pun akan menceritakan kepada Anda siapa kali”. Kemudian, orangtua itu menceritakan berita apa saja yang telah ia dengar tentang Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang telah berangkat untuk berperang pada hari tertentu (*kadzâ*), dan jika berita yang saya dengar ini benar, berarti hari ini, mereka telah berada di suatu tempat (*kadza*), itulah tempat Rasulullah SAW bersama seluruh sahabatnya sedang berada saat itu. Adapun berita tentang orang Quraisy yang saya dengar, mereka telah keluar pada hari tertentu (*kadza*), dan jika berita yang sampai kepada saya ini benar, maka saat ini mereka telah berada di suatu tempat begini dan begini (*kadza*)”. Setelah orangtua itu selesai menceritakan berita apa saja yang dia ketahui tentang dua pasukan yang akan berperangnya di medan perang, ia pun bertanya, “kalian siapa?”. Hal itu pun dijawab oleh Rasul SAW. “*Nahnu min mâ`in*” (kami berasal dari air), yang dimaksud oleh Rasul SAW dalam ucapan beliau adalah air yang memancar atau air mani, lalu Rasul SAW. dan sahabatnya pun berlalu meninggalkan orangtua tersebut, yang difahami oleh orangtua itu bahwa air yang dimaksud oleh Rasul adalah negeri Iraq. (Ali bin Burhanuddin al-Halabiy, *as-Sirah al-Halbiyahfi Sirat al-Amin al-Ma'mun*, juz 2. (Berut: Dar al-Ma'rifah, 1400 H), h. 387.

³⁹*Ibid.*

didasarkan pada kecenderungan masyarakat pemilih atau popularitas suatu keputusan di tengah-tengah masyarakat, sedangkan keputusan ilmiah, apa pun hasil dari suatu ijtihad atau penelitian, suka atau tidak suka masyarakat, bahkan andai semua orang tidak menyukai hasil penelitian, si peneliti tetap akan mempertahankan hasil temuannya. Secara prinsipil, keputusan maupun sikap politik Islam harus didasarkan pada teori *irtikâb akhaff adh-dararain* (memilah keputusan yang mudharatnya lebih ringan)⁴⁰ sekaligus populer bagi masyarakat calon pemilih, meskipun itu tidak populer dan tidak ilmiah bagi kalangan ilmuwan dan akademisi.

Teori ini terbukti kekokohnya ketika dikonfirmasi atau dicocokkan pada PILKADA kota Medan, khususnya pada kekalahan pasangan calon yang diusung oleh partaidi tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim. Salah satu contoh keputusan politik yang tidak didasarkan pada popularitasnya di kalangan pemilih dan juga tidak berdasarkan kaedah Ushuliyyah di atas, sejarah PILKADA yang dialami partai berbasis kader yang tertarbawi, ketika mengajukan calon walikota Medan. Ketika itu partai Islam tersebut memutuskan untuk mengusung calon sepasang laki-laki dan perempuan. Tentu saja dalam pertimbangan ilmiah, hal ini tidak ada masalah dan tidak melanggar syariat. Akan tetapi, para ilmuwan yang sekaligus politisi praktis tersebut lalai dari mengintegrasikan cara dan pendekatan yang mereka lakukan dalam

⁴⁰Keputusan Umar bin Khattab yang didasarkan pada kaedah atau teori *irtikâb akhaff adh-dharain* pada bab *al-mashlahah al-mursalah* dalam berijtihad untuk tidak membagikan empat perlima harta *ghanimah* para pejuang yang ikut di perang, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. pada perang Khaibar. Ijtihad ini ditempuh Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu untuk mendanai kekuatan militer umat Islam secara umum dan melindungi segenap jiwa dan raga kaum muslimin. Pembagian *ghanimah* yang dilakukan oleh Rasul SAW. didasarkan pada firman Allah SWT. "*wa'lamu annama ghanimtum min syaiin fa inna lillahi khumusahu*". Artinya, empat perlima dari harta *ghanimah* seharusnya dibagikan kepada seluruh yang ikut berjuang, akan tetapi, Umar bin Khattab tidak menempuh cara ini, bahkan menahannya untuk dijadikan dana memperkuat angkatan militer umat Islam yang manfaatnya tentu akan kembali kepada seluruh umat Islam. mengambil keputusan politis seperti ini diperbolehkan bagi seorang pemimpin besar, jika tidak ada lagi cara-cara lain yang dapat ditempuh dalam membela tanah air. Dalam hal ini, Umar bin Khattab, Sang Khalifah, berijtihad dalam keputusan politiknya berdasarkan pada kaedah *irtikab akhaff adh-dhararain* dalam konteks masalah *mursalah*. (Ushul wa Qawa'id al-Fiqh, al-Mashalih al-Mursalah, juz 1, h. 18

عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "لو لا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر"، وفي لفظ في الصحيح عن عمر رضي الله عنه: "والذي نفسي بيده لو لا أن أترك آخر المسلمين ليس لهم شيء ما فتحت عليّ قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها" ليس معناه أن عمر رضي الله عنه خصص عموم {وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية

mengkaji peluang terpilihnya calon yang mereka usung dengan tinjauan politis dan kultural, di mana masyarakat kota Medan secara kultur dan kecenderungan sosial, masih lebih mengutamakan pasangan laki-laki dengan laki untuk menjadi pemimpin mereka daripada perempuan, meskipun para ilmuwan dan ulama telah menjelaskan bahwa untuk pemimpin sebuah kota tidak dilarang dalam agama Islam. Para penentu keputusan ini lupa membaca kecenderungan sosial masyarakat pemilih dan taraf pendidikan mereka, sehingga muncullah keputusan politik mereka yang bernuansa ilmiah yang tidak bersinergi dengan nuansa lainnya. Akibatnya, calon yang diusung pun memperoleh suara yang sangat sedikit, jauh dari yang diasumsikan jika diukur dengan jumlah pemilih yang mayoritas orang muslim. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada masyarakat, jawaban mereka, bukan soal kompetensi, tetapi permasalahan keberadaan perempuan dalam pasangan tersebut. Ternyata, masyarakat kota Medan dalam contoh di atas belum siap untuk dipimpin oleh perempuan, walaupun hanya sekedar wakil.

Dalam hal ini, teori *al-'âdat muhakkamah* dalam bidang fiqih juga dapat dijadikan bahan untuk mengintegrasikan keputusan politik dengan keputusan ilmiah, agar keputusan politik yang ditetapkan dapat ditegaskan dan dikokohkan jika diuji dengan teorifiqih maupun ushul fiqh.

c. Model korektif⁴¹; yaitu suatu teori dalam disiplin ilmu tertentu dikoreksi oleh teori dari disiplin ilmu lainnya, hingga menghasilkan disiplin ilmu yang semakin berkembang dan meluas jangkauannya.⁴² Contohnya, tradisi Arab yang membela teman atau saudara sesuku mati-matian tanpa memandang benar tidaknya tindakan orang yang bersangkutan yang dikenal dengan *ta'asshub qabilah*; Nabi SAW. mengoreksi tradisi ini melalui sebuah sabdanya, "*unshur akhâka zhâliman au mazhlûman*". Bagaimana menolong teman yang berlaku zalim? Yaitu dengan cara mengingatkannya atau menegurnya atas perbuatannya yang menyalah, bukan dengan membelanya sepenuh jiwa. Hal ini juga berlaku dalam dunia politik di

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, h. vii.

Indonesia, di mana anggota sebuah partai akan senantiasa berjuang untuk membela teman mereka yang satu partai, meskipun benar-benar terbukti bersalah. Jika perilaku para oknum politisi yang selalu membela secara mati-matian anggota partainya dibiarkan atau tidak diberikan pelajaran yang *integrated* bagi para penekun ilmu politik, tentulah hal ini akan menjadi tradisi buruk yang mereka anggap sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah, meskipun akibatnya sangat fatal bagi fenomena perpolitikan.

Dengan kata lain, dengan menggunakan pendekatan integratif diharapkan nantinya dikotomi yang terjadi antara ilmu umum dan agama dan dikotomi dengan aspek lainnya akan sirna, hegemoni bidang ilmu tertentu terhadap bidang lainnya juga terminimalisir, *superior-inferior feeling* juga akan musnah dari masing-masing bidang ilmu, dan efek laten spesialisasi yang tidak bertanggung jawab terhadap problematika terbaru umat –karena menyelesaikannya sendiri-sendiri– juga akan terhindarkan.

Integrasinampaknya ingin menggunakan logika integral dengan menggabungkan antara ide-ide rasionalisme dan empirisme, juga menggabungkan antara dimensi teologis deduktif dan dimensi antropologis induktif yang nantinya menghasilkan teo-antroposetrik-integralistik, atau yang disebut dengan abduktif.⁴³

⁴³Waryani Fajar Riyanto, *Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Dalam Penelitian 3 (tiga) Disertasi Dosen UIN Sunan Kalijaga*. (Yogyakarta: LEMLIT UIN Sunan Kalijaga, 2012). h. 31.

C. Kesimpulan

Ilmu politik merupakan ilmu yang sangat *integrated* dengan ilmu *al-maqashid* dan *ghayat*, dan ia merupakan salah satu ilmu alat atau wasilah yang paling potensial untuk menghantarkan umat untuk meraih gelar sebagai bangsa yang *khairu ummah* (melalui kiprah politik yang sistemik dampak positifnya hingga mewujudkan *khalīfatullāh fī al-ardh*, pengelola terbaik bumi, dan pengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, dengan cara beriman yang sesungguhnya kepada Allah dan hal-hal ghaib dan upaya *amar ma'ruf* serta *nahi munkar* jika difahami secara *integrated* antara keduanya.

Untuk mewujudkan integrasi antar semua cabang ilmu, maka dunia pendidikan harus mengenalkan hirarki ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ilmuwan, ulama, dan filosof muslim, salah satunya adalah ide Ali Ahmad Madkur yang telah Penulis kutip dalam tulisan ini, lalu mensosialisasikannya kepada seluruh peserta didik, baik itu melalui matakuliah Filsafat Islam, Filsafat ilmu, *islamic worldview*, baik itu secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis pada fakultas Sosial Politik

Konsep integrasi ilmu dalam Islam didasarkan pada kalimat tauhid *Lā Ilāha Illā Allāh*, di mana tidak ada realitas yang hakiki kecuali *The Ultimate reality*, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sumber segala entitas yang ada, Sang 'Alim dan Maha Sumber segala ilmu, *Musabbib al-Asbâb*, dan *Nûrul Anwâr*. Demikian halnya dengan ilmu politik maupun sikap politik, ia terintegrasi dengan Tuhan, agar tidak terjadi dikotomi vertikal, ia juga terintegrasi dengan cabang ilmu lainnya, fisik dan metafisik, sehingga tidak terjadi dikotomi horizontal, ia terintegrasi dengan etika hidup, perilaku, dan *worldview*, sehingga tidak terjadi dikotomi etis, ia terintegrasi dengan kehidupan nyata umat manusia, ia harus memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terjadi dikotomi aktualitas, dan penekun ilmu politik maupun politisinya harus mengintegrasikan antara fisik dan jiwa, sehingga tidak terjadi dikotomi intrapersonal.

Daftar Bacaan

- Al-Faruqi, Ismail Raji. *Islamisasi Pengetahuan*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Al-Bistiy, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim at-Tamimiy. *Kitab as-Shahih Ibn Hibban bi Tartib Ibni Balban*. Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1993.
- Al-Farabi, Usman Amin (ed.) *Ihshâ`u al-'Ulûm*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1949.
- Al-Maghribiy, Abdurrahman Ibnu Khaldun. *Muqaddimah Min Kitâb al-'Ibar wa Dîwâni al-Mubtada`i wa al-Khabar li al-'Allâmah Ibnu Khaldun*. Beirut: Mathba'ah Adabiyyah, 1886.
- Al-Ghazaliy, Al-Imam, Badawi Thabanah (ed.) *Ihyâ`u 'Ulûm ad-Dîn Ma'a Muqaddimatin fî at-Tashawwuf al-Islâmiy wa Dirâsah Tahlîliyyah li Syakhshiyyât al-Ghazali wa falsafatihi fî al-ihya`i*. Indonesia: al-Haramain, tt.
- Al-Buthiy, Muhammad Said Ramadhan. *Al-Hikam al-'Atha`iyyah; Syarh wa Tahlil*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Al-Mizan Study Club, *Esai-Esai ke Arah Filsafat Ilmu Islam*, Buku Berkala I/2012. Kairo: 2012.
- Al-Baihaqiy, Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa Abu Bakar. *Kitab as-Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, (ed.) Muhammad Abdul Qadir 'Atho. Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Bakar, Osman. *Tauhid dan Sains; Esai-Esai Tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Bagir, Haidar. "Pengantar" dalam Mulyadhi Kartanegara, *Reintegrasi Ilmu-Ilmu: Sebuah Demonstrasi*. Jakarta:
- Basya, Ahmad Fuad. *Falsafat al-'Ulum bi Nadhrah al-Islamiyyah*. Kairo: Kulliyat al-'Ulum Jami'ah al-Qahirah, 1984.
- Harahap, Syahrin. *Integrasi Ilmu dan Kesalehan Ilmiah*, cet. Kedua. (Medan: Istiqamah Mulya Pondation, 2016)
- *Islam dan Modernitas; Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal dalam "Bab Musnad Anas bin Malik*.

- Kartanegara, Mulyadhi. *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam*. Jakarta: Baitul Ihsan, 2006.
- , *Integrasi Ilmu; Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2005.
- , *Menyibak Tirai Kejahilan; Pengantar Epistemologi Islam*. Bandung: Mizan, 2003.
- , *Gerbang Kearifan; Sebuah Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- , *Menembus Batas Waktu; Panorama Filsafat Islam*. Bandung: Mizan, 2005.
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Khalil, 'Imad ad-Din. *Madkhal ilâ Islâmiyyat al-Ma'rifah*, Washington D.C.: International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Louis, *al-Munjid fi al-Lugah*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1992.
- Mahmud, Abdul Halim. *Mawqif al-Islâm min al-Fann wa al-'Ilm wa al-Falsafah*. Kairo: Maktabah al-'Usrah, 2003.
- Madkur, Ali Ahmad. *Manhajiyat Tadrîs al-Mawâd asy-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al'Arabiy, 1999.
- Pasya, Ahmad Fuad. *Dimensi Sains Alquran; Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan Dari Alquran*, terj. Muhammad Arifin. Solo: Tiga Serangkai, 2004.
- Riyanto, Fajar Waryani. *Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Dalam Penelitian Tiga Disertasi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: LEMLIT UIN, 2012.